



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 12 Juni 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Berharap Kinerja Meningkat Melalui Renstra 2025-2029

Ketua DPRD Sidoarjo Dorong Setwan Optimalisasi Fasilitas DPRD

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Pimpinan DPRD Sidoarjo memberikan perhatian serius terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 di bawah kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.

Ini dilakukan dengan membahas Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (3/6). Tiga pimpinan DPRD Sidoarjo hadir dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Renstra 2025-2029 tersebut. Yakni Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan. Selain itu hadir Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Suchayono dan seluruh bagian di Sekretariat DPRD (Setwan) Sidoarjo.

Hadir juga Tenaga Ahli (TA) W Budy Wasto yang memberikan paparan terkait Rancangan Renstra 2025-2029 dan sekaligus meminta tanggapan dari peserta acara tersebut. Forum juga dihadiri anggota fraksi PDIP, Raymond Tara Widiyadana yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo. Renstra 2025-2029 ini juga diawasi perwakilan dari media massa. Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah

Nasih mengajak Setwan untuk menyesuaikan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan bagian dan tugas masing-masing. "Semua harus dilaksanakan untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dan sesuai tupoksi masing-masing," cetusnya.

Kata Nash, Sekretaris DPRD Sidoarjo harus menjalankan tugasnya sesuai Rule of The Game. Diantaranya penataan setwan, penataan anggaran di DPRD Sidoarjo, menjalankan peran membantu kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dan peningkatan kapasitas dengan melibatkan Tenaga Ahli (TA) dalam setiap kegiatan ke depannya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, terkait menerjemahkan dan mengawalntakan semua visi-misi Bupati-Wakil Bupati resmi jabatan 2025-2029, tidak harus menjadi beban bagi organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab OPD bisa saling bersinergi



BAHAS RENSTRA: Forum Perangkat Daerah membahas Rancangan Renstra 2025-2029 yang digelar Sekretariat DPRD Sidoarjo, Selasa (3/6). Foto: Mustalis/Panitia BANGSA

merealisasikan 14 Program Kerja Bupati-Wabup Sidoarjo, sesuai visi RPJMD, Menata Desa Membangun Kota, Menuju Sidoarjo Metropolitan, Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Ditegaskannya, dalam visi-misi Bupati-Wabup Sidoarjo yang baru itu, ada sisi inklusif yang artinya, dari setiap OPD (dalam menjalankan program kerja) ada untuk keseluruhannya di setiap bidang, bagian maupun program. "Agar semua bisa nyambung dan

dilmbangi dengan kesesuaian peraturan yang ada. Artinya administrasi jalan dan keuangan harus jalan," bebernya.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno yang mengatakan, setiap bagian di Setwan juga harus melakukan evaluasi dan pembinaan, misalnya selama dua tahun terakhir. Ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai pembinaan di jajaran Sekretariat Dewan.

"Jika kemampuan tim Setwan akan bertambah setiap evaluasi dan pembinaan, maka itu akan mempermudah setiap anggota dan pimpinan dewan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa adanya kendala misalnya soal peraturan baru," beber politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi menyatakan, butuh komitmen kuat seluruh bagian yang ada di Sekretariat DPRD Sidoarjo untuk menjalankan Renstra dengan mendukung kinerja semua anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Meski setiap personil di Setwan melekat status PNS atau ASN.

Hal itu, kata politisi PDIP ini, karena saat bertemu dengan konstituen,

anggota DPRD Sidoarjo juga menampung aspirasi rakyat Sidoarjo yang merupakan mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Aspirasi itu ada yang sudah dipenuhi, belum dikerjakan, maupun yang hendak diwujudkan.

Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Suchayono menyatakan pihaknya siap menjalankan semua saran dan masukan dari pimpinan DPRD Sidoarjo. Meskipun, kata Hari, sebagian tupoksi itu sudah dialokasikan sejak awal menjabat sebagai Sekretaris DPRD Sidoarjo. Hari menegaskan, pihaknya juga memfasilitasi semua kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Sidoarjo.

Ditegaskan Hari, diakui atau tidak, pihaknya juga masih bagian dari OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang harus menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Sidoarjo. Rancangan Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati-Wabup Sidoarjo periode saat ini. Pihaknya juga telah melibatkan sejumlah Tenaga Ahli (TA) agar program kerja DPRD Sidoarjo bisa bersinergi dengan OPD lainnya. (sta/adv)

Diskominfo Sosialisasikan PBJ Media

Luncurkan Aplikasi Digital Pendataan Media 2025

SIDOARJO – Bertempat di Ruang Delta Graha, Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/6/25), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk media, sekaligus meluncurkan Aplikasi Pendataan Media untuk tahun anggaran 2025.

Kepala Diskominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan layanan publik media. Menurutnya, mekanisme konvensional dalam sistem pengadaan pemerintah sudah tidak relevan lagi dan perlu bertransformasi ke sistem digital yang lebih modern.

"Digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga langkah strategis menuju pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, terutama dalam komitmen pemerintah dengan media," ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan sosialisasi ini pihaknya ingin

memastikan seluruh insan media memahami prosedur baru pengadaan jasa publikasi yang kini terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, tahapan mulai dari penawaran, kontrak kerja, hingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, tertib, dan sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Noer Rochmawati juga memperkenalkan Aplikasi Pendataan Media yang dikembangkan oleh Diskominfo. Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu utama dalam pengelolaan data media, sekaligus mendukung terbit administrasi dan verifikasi yang sah.

"Kami ingin memastikan bahwa proses kerja sama ke depan berjalan lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik. Maka, kami minta media untuk mengisi data secara lengkap dalam aplikasi ini, agar tidak perlu lagi pengumpulan dokumen secara manual," tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, yang turut memberikan sambutan dalam acara tersebut,

menyatakan dukungannya terhadap upaya digitalisasi layanan publik oleh Diskominfo.

"Kami sangat mendukung langkah ini. Kehadiran aplikasi pendataan media diharapkan bisa menjadi pusat data yang terbuka dan terpadu, serta membantu semua pihak memahami alur kerja sama secara menyeluruh," ungkapnya.

Rizza menambahkan, kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman agar penerapan sistem digital benar-benar memberikan dampak maksimal dalam tata kelola informasi pemerintahan.

Hadir dalam kegiatan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin dan anggota, Kepala Diskominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, M. Wildan, S.S., juga perwakilan PBJ dan ratusan perwakilan dari berbagai media cetak, dan media elektronik yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. • Loe



Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo Soroti LKPD APBD 2024

SIDOARJO, SURYA – Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo menyorot sejumlah hal penting dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) APBD 2024. Berbagai sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda APBD 2024 yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).

Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Pratama Yudhiarto menyoroti perekonomian Sidoarjo 2024 yang tumbuh positif 5,54 persen. "Memang tumbuh tapi turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang pertumbuhannya 7,63 persen dan 6,16 persen," katanya.

Sorotan lain terkait PD Aneka Usaha, laba bersih 2024 yang disorot 2025 tidak memenuhi target, dan menunggu RUPES. "Hal ini menunjukkan kinerjanya kurang serius. Kami sarankan segera mengaudit direksi yang profesional agar lebih maju dan berkembang," tandasnya.

Terhadap Perumda Delta Tirta, Gerindra melihat kegagalan dalam penghapusan hutang usaha yang dimiliki ke laba bersih. Kemudian terkait pajak daerah 2024 yang targetnya



Rp 1,2 T, realisasi Rp 1,4M atau 113 persen, dianggap OPD-nya kurang matang dalam menganalisa potensi, sehingga lampau terlalu tinggi.

Senada, fraksi PKB, melalui juru bicaranya Muhammad Rojik, juga menyoroti banyak hal. Diantaranya terkait kebijakan kades berurusan dengan hukum, termasuk masalah PTSL, dan sebagainya. PKB mendorong Pemkab agar lebih tegas dan serius dalam melakukan pembinaan terhadap aparat desa.

Fraksi PKB juga menilai banyak aset Pemkab Sidoarjo yang pemanfaatannya kurang maksimal. "Kami mendorong segera diadakan tenaga kearsian dan pembangunan depo arsip. Agar data kearsian aset bisa lebih bagus," ujar Rojik.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembebasan lahan yang terdampak frontage road. Pihaknya meminta agar Pemkab Sidoarjo punya target yang jelas dan terukur. PKB juga menyarankan Pemkab Sidoarjo agar lebih maksimal dalam melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas pendidikan yang rusak dan tidak layak.

Kemudian dari Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya Kusumo Adi Nugroho, menyoroti Silpa Rp 642 M. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu perhatian.

"Kami juga menyoroti

masih banyaknya keluhan jalan rusak, banjir, normalisasi sungai dan sebagainya. Kami merekomendasikan agar Pemkab Sidoarjo menguatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar cepat terselesaikan," kata Dian.

Dari Fraksi PAN, juru bicara Bangun Winarto menyebut bahwa capaian yang sudah positif di 2024 masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Termasuk masih adanya Silpa, disebut sebagai cermin tidak sinkronnya perencanaan anggaran.

"Ada potensi kehilangan pajak dari hotel dan restoran, kemudian banyaknya tunggakan PBB. Ini perlu diperhatikan. Selain itu juga masih banyak terjadi pungli, buktinya ada yang terkena OT Saher Pungli. Bupati harus melakukan pembinaan yang lebih ketat dan serius," tegaskan.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Di gedung dewan Wabup Mimik sempat meresmikan termu kash atas berbagai kritik dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo melalui pandangan umumnya.

Pandangan umum dari fraksi-fraksi tadi memang luar biasa. Semoga ke depan kita bisa terus setting dan sejalan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo ini," kata Wabup (ut).



Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk media, sekaligus meluncurkan Aplikasi Pendataan Media tahun anggaran 2025, Rabu (11/6/25)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo



Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo Soroti LKPJ APBD 2024

SIDOARJO, SURYA – Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo menyorot sejumlah hal seputar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024. Berbagai sorotan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).

Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Pratama Yudhiarto menyoroti perekonomian Sidoarjo 2024 yang tumbuh positif 5,54 persen. "Memang tumbuh tapi turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang peningkatannya 7,63 persen dan 6,16 persen," katanya.

Sorotan lain terkait PD Aneka Usaha, laba bersih 2024 yang disetor 2025 tidak memenuhi target, dan menunggu RUPS. "Hal ini menunjukkan kinerjanya kurang serius. Kami sarankan segera mengagkat direksi yang profesional agar lebih maju dan berkembang," tandasnya.

Terhadap Perumda Delta Tirta, Gerindra melihat kegagalan dalam penghapusan hutang usaha yang dimasukkan ke laba bersih. Kemudian terkait pajak daerah 2024 yang targetnya

Rp 1,2 T, realisasi Rp 1,4M atau 113 persen, dianggap OPD-nya kurang matang dalam menganalisa petentuan potensi, sehingga lampauan terlalu tinggi.

Sementara Fraksi PKB, melalui jubirnya Muhammad Rojik, juga menyoroti banyak hal. Diantaranya terkait banyaknya kades berurusan dengan hukum, termasuk masalah PTSL dan sebagainya. PKB mendorong Pemkab agar lebih tegas dan serius dalam melakukan pembinaan terhadap aparat desa.

Fraksi PBK juga menilai banyak aset Pemkab Sidoarjo yang pemanfaatannya kurang maksimal. "Kami mendorong segera diadakan tenaga kearsian dan pembangunan depo arsip. Agar data kearsipan aset bisa lebih bagus," ujar Rojik.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembebasan lahan yang terdampak frontage road. Pihaknya meminta agar Pemkab Sidoarjo punya target yang jelas dan terukur. PKB juga menyarankan Pemkab Sidoarjo agar lebih maksimal dalam melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas pendidikan yang rusak dan tidak layak.

Kemudian dari Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya Kusumo Adi Nugroho, menyoroti Silpa Rp 642 M. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu perhatian.



"Silpa masih cukup besar, itu menunjukkan kurang cermatnya eksekutif dalam melakukan perencanaan dalam hal penganggaran," tandasnya.

Dan upaya meningkatkan PAD, Fraksi PDIP meminta penempatan dewan pengawas dan direksi di PD Delta Tirta, PD Aneka Usaha, Delta Arta, dan BLUD RSUD Sidoarjo didasarkan kapasitas dan integritas kinerja yang transparan.

"Kami juga menemukan masih ada restoran dan hotel yang belum menggunakan billing system. Sehingga berpotensi menghilangnya PAD dari sektor tersebut," lanjutnya.

Fraksi Golkar melalui jubirnya Dian Felani, mengapresiasi Sidoarjo yang berhasil mempertahankan status WTP. Meski demikian, disebut ada beberapa rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti.

"Kami juga menyoroti

masih banyaknya keluhan jalan rusak, banjir, normalisasi sungai dan sebagainya. Kami merekomendasikan agar Pemkab Sidoarjo menguatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar cepat terselesaikan," kata Dian.

Dari Fraksi PAN, juru bicara Bangun Winarso menyebut bahwa capaian yang sudah positif di 2024 masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Termasuk masih adanya Silpa, disebut sebagai cermin tidak sinkronkannya perencanaan anggaran.

"Ada potensi kehilangan pajak dari hotel dan restoran, kemudian banyaknya tunggakan PBB. Ini perlu diperhatikan. Selain itu juga masih banyak terjadi Pungli, buktinya ada yang terkena OTT Saber Pungli. Bupati harus melakukan pembinaan yang lebih ketat dan serius," tegasnya.

Rapat Paripurna itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Di gedung dewan, Wabup Mimik sempat menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo melalui pandangan umumnya.

"Pandangan umum dari fraksi-fraksi tadi memang luar biasa. Semoga ke depan kita bisa terus seiring dan sejalan dalam membangun Kabupaten Sidoarjo ini," kata Wabup (ufl)



SURYA/J.M. Taufik

PARIPURNA Suasana rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/6/2025). Rapat ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

@dprd_sidoarjo @dprd_sidoarjo DPRD Kabupaten Sidoarjo DPRD Sidoarjo

Bupati: Pelaksanaan Pilkades Serentak Tunggu Kepastian Regulasi



Bupati Sidoarjo Subandi

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan 79 kepala desa pada tahun 2026. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkades Serentak.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.

"Hingga saat ini, turunan

dari Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri terkait Pilkades belum terbit. Saya sudah instruksikan kepada Asisten dan Kepala Dinas PMD untuk segera berkonsultasi ke provinsi dan bersurat langsung ke Kementerian Dalam Negeri agar proses penerbitan regulasi bisa dipercepat," ujar Subandi.

Ia menekankan, jika dalam tiga bulan ke depan belum ada kejelasan dari pusat, dirinya akan langsung menghadap Menteri Dalam Negeri untuk meminta audiensi. Setelah

PP dan Permen diterbitkan, Pemkab akan segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkades di tingkat lokal.

"Target saya, Perda bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan. Jika semua regulasi rampung tepat waktu, maka rangkaian tahapan Pilkades juga bisa berjalan sesuai jadwal, yakni dalam kurun waktu enam bulan," jelasnya.

Subandi juga menyoroti pentingnya keberadaan kepala desa dalam menjalankan program-program stra-

tegis pemerintah pusat. Ia menyinggung peluncuran Koperasi Merah Putih sebagai salah satu contoh program nasional yang perlu didukung penuh oleh pemerintahan desa.

"Presiden telah menginstruksikan bahwa kepala desa harus menjadi ujung tombak dalam menjalankan visi dan misi pemerintah pusat. Jika kepala desa tidak dilantik tepat waktu pada 2026, maka mereka tidak akan dapat menjalankan amanah tersebut," tegasnya.

● Ke Halaman 10



Gencar Razia Truk ODOL, Ratusan Sopir Kena Teguran

Ratusan sopir truk Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayah Sidoarjo mulai merasa waswas. Pasalnya, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sidoarjo gencar melakukan razia dan sosialisasi di sejumlah titik rawan pelanggaran selama bulan Juni 2025.

Diky Putra Sanakir, Wartawan Radar Sidoarjo

MESKI belum menerapkan sanksi tilang, petugas telah memberikan teguran tertulis kepada para sopir yang kedapatan melanggar. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Korlantas Polri dalam mendukung program nasional menuju zero ODOL.

"Sejak awal Juni hingga hari ini, kami telah melakukan sosialisasi sekaligus memberikan teguran tertulis kepada ratusan pengemudi kendaraan ODOL," ujar Kanit Turjawali Satlantas Polresta Sidoarjo, Iptu Ali Rifqi Mubarak, Rabu (11/6).

Iptu Ali menjelaskan, pendekatan awal berupa edukasi dan teguran dimaksudkan untuk mendorong para pengemudi dan pemilik kendaraan menyesuaikan armada mereka dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

• Ke Halaman 10



Gencar Razia...

Teguran yang diberikan tidak hanya secara lisan, tetapi juga secara tertulis. Petugas mencatat nomor polisi kendaraan serta identitas pengemudi sebagai data pendukung untuk penindakan selanjutnya.

"Kalau nanti mereka masih melanggar, kami langsung lakukan penilangan. Tidak harus menunggu bulan depan," tegasnya.

Sebagai informasi, truk ODOL biasanya memiliki dimensi melebihi batas ketentuan—baik dari sisi panjang, lebar, maupun tinggi—dan membawa muatan melebihi kapasitas. Selain membahayakan pengguna jalan lain, truk semacam ini juga menjadi penyebab

kerusakan jalan serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Iptu Ali menambahkan, beban berlebih tidak hanya membahayakan pengemudi, tapi juga berdampak langsung pada performa dan daya tahan kendaraan, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.

Walaupun sanksi tilang belum diberlakukan selama masa sosialisasi di bulan Juni, pihaknya tetap menempatkan personel di sejumlah titik rawan

wan ODOL untuk melakukan pengawasan aktif. "Tidak ada target jumlah pelanggar. Jika kami temukan pelanggaran di lapangan, langsung kami hentikan dan beri tindakan sesuai prosedur," pungkasnya.

Satlantas Polresta Sidoarjo juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap para sopir truk ODOL. Setelah masa sosialisasi berakhir, penindakan hukum secara tegas akan diberlakukan mulai Juli 2025. (dik/vga)



Lempar Batu, Satpol PP Amankan ODGJ Mengamuk di Jalan



RESAH : Satpol PP mengamankan diduga ODGJ mengamuk di Jalan Gajah Mada.

KOTA-Suasana Jalan Gajah Mada, Sidoarjo mendadak heboh pada Rabu siang (11/6) sekitar pukul 13.00. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) tiba-tiba mengamuk di tengah jalan sambil berteriak dan melempar batu ke arah pengguna jalan.

Aksi pria tersebut membuat warga dan pengendara panik. Khawatir situasi memburuk, warga segera melapor ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo.

Kepala Seksi Operasi Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat mengenai keberadaan seorang ODGJ yang meresahkan di lokasi.

"Benar, kami menerima aduan dari masyarakat terkait seorang ODGJ yang mengamuk dan melempar batu di Jalan Gajah Mada. Tindakan itu sangat membahayakan," ujar Novianto saat dikonfirmasi Radar Sidoarjo.

Menyikapi laporan itu, Satpol PP langsung mengerahkan petugas ke lokasi untuk mengevakuasi pria tersebut. Meski sempat melakukan perlawanan, ODGJ itu akhirnya berhasil diamankan.

"Karena situasinya membahayakan, kami terpaksa memborgol yang bersangkutan untuk proses evakuasi. Setelah itu, langsung kami bawa ke Liponsos Sidoarjo," jelasnya.

Menurut keterangan warga sekitar, pria paruh baya tersebut sebelumnya tidak pernah terlihat di kawasan tersebut.

● Ke Halaman 10

Lempar Batu,...

Kehadirannya yang tiba-tiba dan langsung mengamuk sempat membuat masyarakat sekitar ketakutan.

Novianto juga mengimbau masyarakat

untuk segera melapor jika menemukan kejadian serupa. "Kami berharap warga tidak ragu melapor. Keberadaan ODGJ masih sering ditemui, dan respons cepat sangat dibutuhkan demi keamanan bersama," pungkasnya. (dik/vga)

Tak Tergoda meski Penyuplai Sampah Beri Diskon

Produsen tahu di Dusun Klagen, Desa Tropodo jadi sorotan pemberitaan nasional, bahkan internasional.

Karena penggunaan sampah untuk bahan bakar produksi tahu. Tapi, beberapa produsen telah beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Seperti Sunyoto yang menggunakan serbuk kayu. Meskipun begitu, penyuplai sampah tetap menggodanya.

AHMAD REZATRIYA BELANI, Sidoarjo

ASAP dari tempat produksi tahu milik Sunyoto, warga Dusun Klagen, Desa Tropodo, Krian, tak lagi hitam dan pekat. Tidak lagi menyedotkan udara. Tidak ada pula jelaga yang menodai genting rumah

tetangga. Dia telah menggunakan serbuk kayu sebagai bahan bakar penggorengan tahu. Pria 54 tahun itu meneruskan bisnis produksi tahu yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Sunyoto



mempunyai tempat pembuat tahu mentah dan goreng di tempatnya kini. "Dulu, saat masih dipegang orang tua itu pakai sekam dulu," tuturnya.

Bukan hanya orang tua Sunyoto, tapi semua pemilik industri kecil menengah (IKM) tahu di desa itu menggunakan sekam.

Baca Tak... Hal 19

JAGA KUALITAS: Sunyoto telah menggunakan serbuk kayu sebagai bahan bakar penggorengan tahu di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Krian.

Jawa Pos

SPMB Jalur Prestasi Nilai Rapor Dibuka Hari Ini



MASA PENDAFTARAN: Papan penerimaan SPMB dipasang di depan gerbang SMP N 1 Sidoarjo kemarin (11/6).

Calon Siswa Bisa Pilih SMP Negeri atau Swasta

SIDOARJO - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP jalur prestasi nilai rapor resmi dibuka hari ini (12/6). Selain SMP Negeri, sejumlah SMP swasta juga bisa dipilih calon siswa. Kabid Mutu Pendidikan

Dinas Pendidikan (Dikbud) Sidoarjo Netti Lastiningsih mengatakan, pendaftaran jalur prestasi nilai rapor dibuka hingga Jumat (14/6) mendatang. "Jalur prestasi ini dibagi dua. Yakni prestasi kejuaraan atau non-akademik dan jalur nilai rapor yang dibuka besok (hari ini, Red)," katanya kemarin (11/6).

"Di jalur prestasi nilai rapor penilaian juga melihat kede-

katan calon siswa dengan sekolah yang dipilih sebagai tolak ukur lainnya," imbuhnya. Netti juga mengatakan selain SMP negeri, ada enam SMP swasta yang bisa dimasuki dengan jalur prestasi nilai rapor, yaitu SMP Al Islam Taman, SMP Tamadun Afkar, SMP Terpadu Al Mubarakah Porong, SMP Jati Agung Taman, SMP Dharma Wanita 8 Waru, dan SMP PGRI 4 Waru. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SATPOL PP SIDOARJO

MERESAHKAN: ODGJ yang mengamuk di Jalan Gajah Mada diamankan petugas Satpol PP Sidoarjo kemarin (11/6).

Ngamuk dan Lempari Pengendara, ODGJ Ditangkap Satpol PP

WARGA di Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, sempat dibuat resah dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang berulah pukul 13.00 kemarin (11/6). Sebab, pria paro baya itu tidak hanya terus menerus berteriak tanpa alasan. Namun, juga sesekali melempar pengendara.

Satpol PP Sidoarjo yang mendapat aduan dari warga pun mengerahkan personelnya. ODGJ itu akhirnya berhasil ditangkap meski sempat berontak. "Langsung kita borgol agar tidak membahayakan. Dibawa ke Liponsos," kata Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Kota R Novianto Koesno.

ODGJ itu, menurut warga di lokasi tidak pernah terlihat sebelumnya. Dia mendadak muncul dan mengamuk. Novianto mengimbau masyarakat yang melihat situasi serupa agar segera melapor. "Biar segera ditangani. Berbahaya kalau dibiarkan," tuturnya. (edi/uzi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Diskominfo Sosialisasikan PBJ Media

Luncurkan Aplikasi Digital Pendataan Media 2025

SIDOARJO – Bertempat di Ruang Delta Graha, Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/6/25), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk media, sekaligus meluncurkan Aplikasi Pendataan Media untuk tahun anggaran 2025.

Kepala Diskominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan layanan publikasi media. Menurutnya, mekanisme konvensional dalam sistem pengadaan pemerintah sudah tidak relevan lagi dan perlu bertransformasi ke sistem digital yang lebih modern.

“Digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga langkah strategis menuju pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, terutama dalam kemitraan pemerintah dengan media,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan sosialisasi ini pihaknya ingin

memastikan seluruh insan media memahami prosedur baru pengadaan jasa publikasi yang kini terintegrasi secara digital. Dengan sistem ini, tahapan mulai dari penawaran, kontrak kerja, hingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, tertib, dan sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Noer Rochmawati juga memperkenalkan Aplikasi Pendataan Media yang dikembangkan oleh Diskominfo. Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu utama dalam pengelolaan data media, sekaligus mendukung tertib administrasi dan verifikasi yang sah.

“Kami ingin memastikan bahwa proses kerja sama ke depan berjalan lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik. Maka, kami minta media untuk mengisi data secara lengkap dalam aplikasi ini, agar tidak perlu lagi pengumpulan dokumen secara manual,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, yang turut memberikan sambutan dalam acara tersebut,

menyatakan dukungannya terhadap upaya digitalisasi layanan publik oleh Diskominfo.

“Kami sangat mendukung langkah ini. Kehadiran aplikasi pendataan media diharapkan bisa menjadi pusat data yang terbuka dan terpercaya, serta membantu semua pihak memahami alur kerja sama secara menyeluruh,” ungkapnya.

Rizza menambahkan, kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman agar penerapan sistem digital benar-benar memberikan dampak maksimal dalam tata kelola informasi pemerintahan.

Hadir dalam kegiatan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin dan anggota, Kepala Diskominfo Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, M. Wildan, S.S., juga perwakilan PBJ dan ratusan perwakilan dari berbagai media cetak, dan media elektronik yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. • Loe



LOEFT/DUTA

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk media, sekaligus meluncurkan Aplikasi Pendataan Media tahun anggaran 2025, Rabu (11/6/25)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RSUD Sidoarjo Barat Tingkatkan Mutu Pelayanan

SIDOARJO - Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik di RSUD Sidoarjo Barat serta persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, diperlukan peran serta antara penyelenggara pelayanan publik, yakni RSUD Sidoarjo Barat, dengan masyarakat/stakeholder sebagai penerima layanan.

Hal ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, RSUD Sidoarjo Barat menggelar Forum Konsultasi Publik pada Rabu (11/6/25) di Aula Bimasakti Lantai 2, Gedung Administrasi Terpadu RSUD Sidoarjo Barat.

Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdullah Segaf Al Hadad, MM me-



Forum Konsultasi Publik RSUD Sidoarjo Barat Rabu (11/6/25), di Aula Bimasakti Lantai 2, Gedung Administrasi Terpadu.

nyampaikan sebagai penyelenggara pelayanan publik, RSUD Sidoarjo Barat memiliki tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Untuk dapat memberikan pelayanan prima bagi penerima layanan, kami menyadari perlunya melakukan perbaikan secara terus-menerus yang diwujudkan melalui peningkatan sistem serta pola pikir untuk memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati," jelas Abdullah.

Lebih lanjut Abdullah menyampaikan bahwa pelayanan publik yang baik harus tercermin dari sikap yang responsif, inklusif, dan solutif. Setiap pemberi layanan harus memiliki empati serta senantiasa menjunjung tinggi integritas.

"Untuk itu, kami berusaha meningkatkan komunikasi publik secara efektif dan terpercaya, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan," tambahnya. • loe

CS Scanned with CamScanner

DAFTAR



Berharap Kinerja Meningkat Melalui Renstra 2025-2029

Ketua DPRD Sidoarjo Dorong Setwan Optimalisasi Fasilitas DPRD

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Pimpinan DPRD Sidoarjo memberikan perhatian serius terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 di bawah kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.

Ini dilakukan dengan membahas Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (3/6). Tiga pimpinan DPRD Sidoarjo hadir dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Renstra 2025-2029 tersebut. Yakni Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan. Selain itu hadir Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Suchayono dan seluruh bagian di Sekretariat DPRD (Setwan) Sidoarjo.

Hadir juga Tenaga Ahli (TA) W Budy Wasito yang memberikan paparan terkait Rancangan Renstra 2025-2029 dan sekaligus memimpin dari peserta acara tersebut. Forum juga dihadiri anggota dewan DPRD Sidoarjo, yakni Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan, dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Hari Suchayono. Forum ini bertujuan untuk membahas Rancangan Renstra 2025-2029 dan sekaligus memimpin dari peserta acara tersebut. Forum juga dihadiri anggota dewan DPRD Sidoarjo, yakni Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan, dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Hari Suchayono.

Nasih mengajak Setwan untuk menyesuaikan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan bagian dan tugas masing-masing. "Semua harus dilaksanakan untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dan sesuai tupoksi masing-masing," cetusnya. Kota Nasih, Sekretaris DPRD Sidoarjo harus menjalankan tugasnya sesuai Rule of The Game. Diantaranya penataan setwan, penataan anggaran di DPRD Sidoarjo, menjalankan peran membantu kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dan peningkatan kapasitas dengan melibatkan Tenaga Ahli (TA) dalam setiap kegiatan ke depan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, terkait menerjemahkan dan menjawab tantangan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab OPD bisa saling bersinergi



BAHAS RENSTRA: Forum Perangkat Daerah membahas Rancangan Renstra 2025-2029 yang digelar Sekretariat DPRD Sidoarjo, Selasa (3/6). Foto: Mustain/Harian BANGSA

merealisasikan 14 Program Kerja Bupati-Wabup Sidoarjo, sesuai visi RPJMD, Menata Desa Membangun Kota, Menuju Sidoarjo Metropolitan, Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan. Ditegaskannya, dalam visi-misi Bupati-Wabup Sidoarjo yang baru ini, ada sisi Inklusif. Yang artinya, dari setiap bidang, bagian maupun program. "Agar semua bisa nyambung dan

diimbangi dengan kesesuaian peraturan yang ada. Artinya administrasi jalan dan keuangan harus jalan," bebernya.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno yang mengatakan, setiap bagian di Setwan juga harus melakukan evaluasi dan pembinaan, misalnya selama dua tahun terakhir. Ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai pembinaan di jajaran Sekretariat Dewan.

"Jika kemampuan tim Setwan akan bertambah setiap evaluasi dan pembinaan, maka itu akan mempermudah setiap anggota dan pimpinan dewan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa adanya kendala misalnya soal peraturan baru," beber politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi menyatakan, butuh komitmen kuat seluruh bagian yang ada di Sekretariat DPRD Sidoarjo untuk menjalankan Renstra dengan mendukung kinerja semua anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Hal itu, kata politisi PDIP ini, karena saat bertemu dengan konstituen,

anggota DPRD Sidoarjo juga menampung aspirasi rakyat Sidoarjo yang merupakan mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Aspirasi itu ada yang sudah dipenuhi, belum dikerjakan, maupun yang hendak diwujudkan.

Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Suchayono menyatakan pihaknya siap menjalankan semua saran dan masukan dari pimpinan DPRD Sidoarjo. Meskipun, kata Hari, sebagian tupoksi itu sudah dijalankannya sejak awal menjabat sebagai Sekretaris DPRD Sidoarjo. Hari menegaskan, pihaknya juga memfasilitasi semua kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Sidoarjo. Ditegaskan Hari, diakui atau tidak, pihaknya juga masih bagian dari OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang harus menjalankan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Sidoarjo. Rancangan Renstra 2025-2029 juga sudah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati-Wabup Sidoarjo periode saat ini. Pihaknya juga telah melibatkan sejumlah tenaga ahli (TA) agar program kerja DPRD Sidoarjo bisa bersinergi dengan OPD lainnya. (sta/adv)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Penyampaian PU Fraksi - Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024

RedSidoarjo © Juni 11, 2025



Liputan5news.com - Sidoarjo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yakni penyampaian pandangan umum (PU) fraksi - fraksi DPRD kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/6/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih beserta anggota, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati beserta jajaran Pejabat daerah, Pimpinan TNI Polri atau yang mewakili, Pimpinan partai politik, rektor, LSM, wartawan.

Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih.

Dalam pembukaannya Abdillah Nasih menyampaikan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas segala ridho dan rahmatnya kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SWT. Di hari yang berbahagia ini atas nama pimpinan dan anggota kami ucapkan terimakasih kepada seluruh hadirin khususnya ibu wakil bupati Sidoarjo yang telah hadir di ruangan ini.

"Kegiatan persidangan rapat paripurna ini berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD kabupaten Sidoarjo pada tanggal 2 Juni 2025 yang ditindak lanjuti berita acara rapat badan musyawarah DPRD kabupaten Sidoarjo dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024," ucapnya.



Masih kata Nasih dengan dihadiri 32 orang anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan dengan ucapan Bismillah kami buka sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dan terbuka untuk umum.

Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi diawali dari pandangan umum fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicara Pratama Yudhiarto, S.H, fraksi PKB disampaikan oleh juru bicara M. Rojik, fraksi PDIP disampaikan oleh juru bicara Kusumo Adi Nugroho, fraksi PAN disampaikan oleh juru bicara Bangun Winarso, fraksi PKS dan PPP disampaikan oleh juru bicara Vike Widya Asroni. Fraksi Nasional Demokrat disampaikan oleh juru bicara Aditya Indra Putra Muallim.

Fraksi fraksi tersebut menyoroti dengan tegas pernyataan bupati Sidoarjo H. Subandi di Medsos yang telah viral pada tanggal 19 maret 2025. Yang mana Subandi mengatakan jika selama ini bupati dan wakil bupati Sidoarjo menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo hanya sebatas untuk menghambur - hamburkan uang.

Hanya partai Golkar yang dalam menyampaikan pandangan umum fraksi fraksi tidak menanggapi pernyataan bupati Sidoarjo yang viral di medsos.

"Merespon kekaduahan di ruang publik terkait pernyataan bupati Subandi, juga meminta bupati Subandi untuk Klarifikasi," pesan fraksi Nasional Demokrat.

Sementara itu usai rapat paripurna, kepada awak media Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 adalah hal yang wajar - wajar saja karena itu adalah fungsi dari kami yakni fungsi pengawasan. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan di 2024. Walaupun kita memberikan apresiasi karena banyak indikator - indikator dan capaian di tahun 2024 tetapi dilapangan juga masih banyak yang perlu dikritisi.

"Mulai hari ini tingkat perekonomian kita yang tidak mencapai target, indeks lingkungan hidup tidak mencapai target, silpa naik. Artinya ini bagian dari kita untuk selalu mengkritisi memberikan masukan kepada eksekutif agar kedepan mereka memperbaiki pr pr yang ada di tahun 2024, sehingga nanti di tahun 2025 yang rencananya ada PAK bisa tuntas," ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai pandangan fraksi - fraksi terkait pernyataan bupati yang viral, Abdillah Nasih menyampaikan ini bagian dari dinamika dan demokratisasi di tubuh DPRD. Ketika marwah DPRD di singgung dan masing masing fraksi murni bisa memberikan pendapatnya yaa seperti ini.

"Ini adalah bagian oto kritik kita kepada bupati khususnya, agar ke depan lebih berhati hati dalam memberikan statemen karena hubungan eksekutif dan legislatif adalah mitra dalam arti kita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kami di sini sejajar antara eksekutif dan legislatif. Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa ada harmonisasi dari kedua belah pihak," ungkapnya.

Di singgung mengenai DPRD tukang menghamburkan uang Abdillah Nasih menyampaikan bahwa hal itu tidak benar kalau kita dianggap menghamburkan uang. Kalau kita melihat fungsi kita adalah fungsi budgeting tetapi kita bukan pelaksana. Fungsi budgeting dibahas bersama antara ABD dan Banggar. Ketika dianggap fungsi budgeting terkait dengan masalah pokir, berapa persen prosentase pokir kita jika dibandingkan dengan renja OPD.

"Aplikasi pelaksanaan pokir di DPRD adalah bagian dari aspirasi kami dari konstituen yang diambil dari reses - reses yang sudah kita lakukan termasuk hasil kerja kerja kami di lapangan atas pengamatan kami di lapangan. Misalkan di daerah A membutuhkan kegiatan kegiatan demi untuk pembangunan di Sidoarjo. (Yanti)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Diskominfo Sidoarjo Luncurkan Aplikasi Pendataan Media

by Admin Warta Digital 11/06/2025 0 308

SHARE



Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) khusus untuk media yang diselenggarakan di Ruang Delta Graha, lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/6/2025).

SIDOARJO (wartadigital.id) – Memasuki semester kedua Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo meluncurkan aplikasi Pendataan Media.

Dengan menggunakan aplikasi, Diskominfo bisa mengetahui produktivitas tiap media yang selama ini menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Dra Noer Rachmawati MSi Ak, pada kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) khusus untuk media yang diselenggarakan di Ruang Delta Graha, lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/6/2025).



"Terimakasih atas kerjasama rekan media yang sudah membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam berbagi informasi kepada masyarakat," ungkap Noer Rachmawati.

Noer Rachmawati menambahkan diharapkan rekan media bisa terus membantu Pemerintah Sidoarjo dalam membangun melalui pemberitaan yang bisa mendorong pemerintah dan masyarakat Sidoarjo dalam mewujudkan Sidoarjo yang maju dan sejahtera.

Acara diikuti oleh perwakilan dari berbagai media cetak, televisi, radio dan online yang selama ini menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Dra Noer Rachmawati M.Si Ak, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik M. Wildan SS, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, serta Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizin, yang juga memberikan sambutan dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya terhadap upaya digitalisasi layanan publik oleh Diskominfo.

"Kami sangat mendukung langkah ini. Kehadiran aplikasi pendataan media diharapkan bisa menjadi pusat data yang terbuka dan terpercaya, serta membantu semua pihak memahami alur kerja sama secara menyeluruh," ujarnya.

Rizza menambahkan, kegiatan sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, agar penerapan sistem digital benar-benar memberikan dampak maksimal dalam tata kelola informasi pemerintahan.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faidzin dan anggota A, Elok Suciati merasa heran melihat wartawan Sidoarjo, kecepatan Sidoarjo yang gesit dan cepat menulis berita.

"Kadang saya masih bicara di podium dan belum selesai, beritanya sudah ke mana-mana," ucap Cak Rizza dengan nada heran.

"Kecepatan berita Sidoarjo luar biasa, kalau dulu ada kejadian hari ini maka beritanya baru terbaca besok karena edisi koran, namun sekarang kita masih bicara di podium, sudah ada beritanya," imbuhnya sambil guyon dan tertawa. sis

